

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) TAHUN 2023

(Studi Kasus Di Desa Tawangsari Kecamatan Garum)

Dwi Wahyu Ningsih¹, Mochammad Alexander Mujiburrohman²

Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia^{1,2}

E-mail: dwi.why066@student.ub.ac.id¹

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat miskin merupakan salah satu fokus utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dicanangkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia bertujuan untuk memberdayakan keluarga kurang mampu melalui penyediaan bantuan sosial dalam bentuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial mereka. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat melalui Program KUBE di Desa Tawangsari, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengevaluasi keberhasilan kegiatan pemberdayaan serta peran KUBE dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KUBE di Desa Tawangsari melibatkan tiga tahapan utama: penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Faktor pendukung seperti adanya regulasi dari pemerintah dan adanya sistem monitoring berkontribusi positif terhadap keberhasilan program. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa keterbatasan kualitas dana yang diterima oleh kelompok menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan kemitraan dan monitoring yang lebih sistematis sebagai solusi untuk mengatasi hambatan tersebut.

Kata Kunci: Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat, Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

ABSTRACT

Empowerment of the poor is one of the main focuses in poverty reduction efforts in Indonesia. The Joint Business Group (KUBE) program launched by the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia aims to empower underprivileged families through the provision of social assistance in the form of Productive Economic Enterprises (UEP), with the hope of increasing their income and social welfare. This study aims to describe community empowerment through the KUBE Program in Tawangsari Village, Garum Sub-district, Blitar District. Using a descriptive qualitative approach, this study evaluates the success of empowerment activities as well as the role of KUBE in improving the welfare of the poor. The

results showed that the implementation of KUBE in Tawangsari Village involved three main stages: awareness raising, capacity building, and empowerment. Supporting factors such as government regulations and a monitoring system contributed positively to the success of the program. However, this study also found that the limited quality of funds received by the groups was a major obstacle in the implementation of the program. Therefore, this study recommends strengthening partnerships and more systematic monitoring as solutions to overcome these obstacles.

Keywords: *Poverty, Community Empowerment, Joint Business Group (KUBE).*

PENDAHULUAN

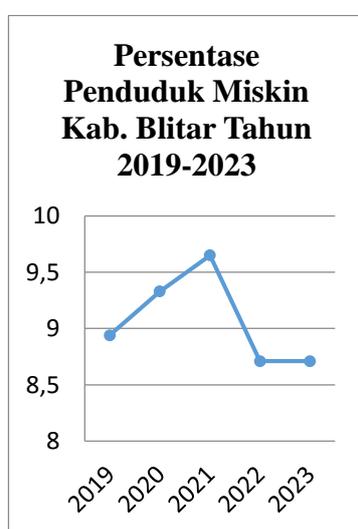
Kemiskinan merupakan permasalahan pelik yang mendapat perhatian dari berbagai negara. (Duraesa, 2021) mendefinisikan kemiskinan sebagai sebuah standar hidup yang rendah, hal ini ditandai dengan tingkat kekurangan materi yang dialami oleh individu atau sekelompok individu dibandingkan dengan standar hidup yang biasanya berlaku dalam lingkungannya. Dengan begitu, kemiskinan juga dapat diartikan sebagai kondisi di mana individu atau kelompok tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak.

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya dan sumber daya alam, masih menghadapi tantangan serius dalam mengatasi kemiskinan. Meskipun sudah banyak upaya dilakukan untuk memerangi kemiskinan, nyatanya Indonesia masih memiliki persentase penduduk miskin yang cukup tinggi. Pada tahun 2023 lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan bahwa di Indonesia

masih terdapat 25,90 juta orang yang hidup dalam kemiskinan atau sebesar 9,36 persen (BPS, 2023). Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, diperlukan upaya yang lebih signifikan dan komprehensif.

Kabupaten Blitar, merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur mencatat bahwa hingga kini Kabupaten Blitar masih terus berjuang untuk menekan banyaknya persentase penduduk miskin di daerahnya. Pada tahun 2019 tercatat bahwa Kabupaten Blitar memiliki persentase penduduk miskin sebanyak 8,94 persen. Kemudian, ditahun 2020 menunjukkan adanya kenaikan sebesar 0,39 persen, sehingga tingkat persentase penduduk miskin di Kabupaten Blitar pada tahun 2020 sebanyak 9,33 persen. Di tahun 2021, mengalami kenaikan lagi sebesar 0,32 persen menjadi 9,65 persen. Adanya kenaikan tingkat kemiskinan di Kabupaten Blitar pada tahun 2020 dan 2021 dikarenakan adanya pandemi covid-19. Kemudian,

di tahun 2022 dan 2023 ini tingkat kemiskinan di Kabupaten Blitar menunjukkan adanya persamaan jumlah yakni sebesar 8,71 persen atau sekitar 101,94 juta jiwa (BPS Prov. Jawa Timur, 2023). Berikut akan disajikan persentase jumlah penduduk di Kabupaten Blitar selama lima tahun terakhir:



Gambar 1 Persentase Penduduk Miskin Kab. Blitar Tahun 2019-2023

Sumber: diolah penulis dari data BPS Prov. Jatim

Tingginya kemiskinan di Kabupaten Blitar, menunjukkan perlunya upaya penanggulangan kemiskinan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin menjadi tujuan utama dalam penanggulangan kemiskinan (Arifin, 2020). Kesejahteraan masyarakat miskin dapat ditingkatkan melalui berbagai inisiatif dan program yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap sumber daya dan memperbaiki kualitas hidup

masyarakat. Adapun beberapa program telah dilakukan Pemerintah Indonesia, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan bantuan usaha atau yang sering dikenal dengan nama Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Salah satu program penanggulangan kemiskinan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan program pemerintah yang memiliki tujuan untuk memberdayakan keluarga yang berada dalam kondisi kurang mampu melalui penyediaan bantuan sosial berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP). KUBE diwujudkan sebagai sebuah kelompok yang berasal, dari, dan dikelola oleh keluarga miskin sendiri, dengan tujuan utama meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial mereka. Bantuan yang diberikan oleh program ini bersifat non-tunai dan disalurkan melalui transfer ke rekening kelompok, dimana harapannya dengan adanya KUBE mampu membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan (Kemensos RI, 2019).

Kecamatan Garum, merupakan salah satu kecamatan di Kab. Blitar yang memiliki sebaran penduduk miskin terbanyak. Berdasarkan data persebaran penduduk miskin oleh Dinas Sosial Kab. Blitar, kecamatan tersebut ditahun 2023 memiliki total 33.350 individu yang berada pada garis kemiskinan. Hal tersebut menempatkan

Garum sebagai kecamatan ketiga dengan penduduk miskin terbanyak, setelah Kecamatan Ponggok dan Kanigoro.

Tawang Sari sebagai satu-satunya desa di Kecamatan Garum yang ditahun 2023 lalu mengajukan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Dimana dalam hal ini, implementasi program KUBE di desa tersebut sangat penting, sebab program tersebut membantu memberikan dorongan langsung kepada penduduk yang menghadapi tantangan ekonomi. KUBE, juga menawarkan peluang bagi masyarakat miskin untuk mengelola usahanya secara kolektif, sehingga nantinya masyarakat miskin tersebut memiliki keterampilan untuk mengelola usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana program KUBE berhasil dalam memberdayakan komunitas lokal. Penelitian ini juga akan mengkaji enam indikator yang harus ada dalam teori pemberdayaan masyarakat menurut (Stewart, 1994) yang terdiri atas kesadaran, koordinasi, mendidik, menyemangati, pembinaan, dan pendampingan.

Untuk mengetahui secara mendalam terkait pemberdayaan dalam program KUBE di Desa Tawang Sari, peneliti menggunakan tiga jurnal ilmiah sebagai tinjauan literatur. Jurnal ilmiah yang ditelaah memiliki jangka waktu dari tahun 2020-2024. Berikut ketiga

jurnal ilmiah yang telah mengkaji program KUBE di berbagai daerah di Indonesia.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Auliyaa Zahra & Mulyono, 2024) yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam program KUBE berhasil apabila program tersebut mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat dan membantu masyarakat untuk mandiri. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Febriani *et al.*, 2022) menjelaskan keberhasilan pemberdayaan KUBE tercermin ketika kemandirian masyarakat terwujud dan masyarakat memperoleh dampak positif dari pemberdayaan tersebut. Ketiga, penelitian oleh (Hurriati, 2020) mengatakan keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam program KUBE dikatakan berhasil apabila dalam pemberdayaan tersebut ada pemberian pengetahuan dan pemberian pengalaman.

Penelitian ini berbeda dengan tiga penelitian tersebut, sebab dalam penelitian ini peneliti tidak hanya menilai keberhasilan pemberdayaan dalam program KUBE berdasarkan pencapaian tujuan, yaitu kemandirian masyarakat dan transfer pengetahuan. Namun, penelitian ini mengkaji enam indikator yang harus ada dalam teori pemberdayaan masyarakat menurut (Stewart, 1994), yang meliputi kesadaran, koordinasi, pendidikan, penyemangatan, pembinaan, dan pendampingan.

KAJIAN PUSTAKA

Kemiskinan

Menurut Suparlan (2004), kemiskinan dapat dijelaskan sebagai kondisi kurangnya pendapatan dan aset yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta akses yang memadai terhadap layanan kesehatan dan pendidikan (Sari, 2021). Sejalan dengan hal itu, BPS menjelaskan bahwa kemiskinan dipahami sebagai ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama kebutuhan makanan. BPS mengukur kemiskinan berdasarkan kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Oleh karena itu, penduduk yang dianggap miskin adalah mereka yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah batas garis kemiskinan yang telah ditentukan.

Herniati (dalam Utami dan Imaningsih, 2024) menjelaskan bahwa kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis. Pertama, kemiskinan alamiah adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya karena rendahnya kualitas sumber daya alam yang tersedia. Kedua, kemiskinan kultural terjadi ketika seseorang atau kelompok kurang memiliki semangat kerja keras dan inisiatif untuk mencari penghasilan yang mencukupi untuk meningkatkan taraf hidupnya. Terakhir, kemiskinan struktural terjadi akibat dari kurangnya efektivitas dan efisiensi dalam implementasi kebijakan, baik

secara langsung maupun tidak langsung, yang disebabkan oleh struktur sosial dan kelembagaan dalam masyarakat. Selain itu, kemiskinan struktural dapat muncul ketika kelompok masyarakat miskin sangat bergantung pada masyarakat yang lebih mampu secara sosial., yang menyebabkan kehilangan kemampuan kelompok masyarakat miskin dalam bernegosiasi.

Ada tiga aspek utama yang dapat memicu kemiskinan menurut Suharto (2005) yaitu: individu, sosial, dan kultural. Aspek individu berkaitan dengan kondisi fisik dan psikologis seseorang yang mengalami kemiskinan, termasuk sikap, pilihan, dan keterampilan individu tersebut dalam menghadapi kehidupan. Aspek sosial mengacu pada faktor-faktor dalam lingkungan sosial yang memperkuat kemiskinan, seperti diskriminasi berdasarkan usia, jenis kelamin, atau etnis, serta kondisi sosial dan ekonomi keluarga yang cenderung mewariskan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan aspek kultural mengacu pada nilai-nilai budaya yang berkontribusi pada kemiskinan, termasuk konsep kemiskinan kultural atau budaya yang menunjukkan bagaimana budaya memengaruhi kehidupan sehari-hari dan rutinitas individu (Kamilah dan Musfirah, 2024).

Selanjutnya, (Heriska *et al.*, 2023) juga menjelaskan bahwa kemiskinan di daerah pedesaan disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya kepemilikan faktor produksi seperti

tanah yang memadai, modal, dan keterampilan, serta kesulitan dalam memperoleh aset produksi dan pendapatan yang tidak mencukupi untuk membeli tanah atau modal usaha. Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi penyebab kemiskinan karena orang-orang tersebut memiliki keterbatasan dalam memperoleh pengetahuan atau keterampilan baru yang diperlukan untuk pekerjaan yang lebih baik.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata "daya" yang berarti kekuatan. Dalam konteks ini, pemberdayaan berarti memberikan kekuatan atau kemampuan kepada kelompok yang kurang berdaya atau lemah, yang belum mampu mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Pemberdayaan (*empowerment*) adalah proses yang memberikan kekuatan, pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya kepada individu atau kelompok agar mereka dapat lebih baik dalam menghadapi tantangan, membuat keputusan, dan mengembangkan potensi yang mereka miliki (Handini, *et al* 2021). Artinya, pemberdayaan bukan sekadar memberikan bantuan atau bimbingan, melainkan memberikan kemampuan kepada individu atau kelompok untuk memiliki kontrol atas kehidupan dan pengaruh pada lingkungannya.

Dalam pengertian lain, pemberdayaan masyarakat adalah usaha

untuk membuat masyarakat menjadi lebih berdaya dan mandiri, sehingga mampu mengatasi tantangan yang dihadapinya secara independen. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih positif, sehingga secara bertahap kualitas hidup dan kesejahteraannya dapat meningkat (Humaira, 2022).

Tujuan pokok dari pemberdayaan masyarakat menurut pandangan (Habib, 2021) adalah memberikan kekuatan kepada kelompok yang kurang mampu, terutama yang berada dalam posisi yang lemah. Ketidakmampuan ini dapat disebabkan oleh faktor internal, seperti cara pandang mereka terhadap diri sendiri, atau faktor eksternal, seperti penindasan dari struktur sosial yang tidak adil. Diharapkan, setelah melalui proses pemberdayaan, masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang lebih baik, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan akhirnya menjadi mandiri. Kemandirian ini tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga meliputi aspek sosial, budaya, dan hak-hak politik yang memungkinkan masyarakat untuk berperan dalam menentukan nasib mereka sendiri.

Menurut (Stewart, 1994) pemberdayaan dapat dikatakan berhasil jika mencakup enam indikator sebagai berikut:

1. Penyesuaian adalah proses di mana individu atau kelompok diberikan pemahaman tentang potensi yang mereka miliki dan

- pentingnya peran mereka dalam masyarakat.
2. Koordinasi adalah upaya untuk mengatur dan menyelaraskan berbagai pihak yang terlibat dalam program pemberdayaan.
 3. Pendidikan dalam konteks pemberdayaan masyarakat mencakup pelatihan dan pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan usaha.
 4. Penyemangatan adalah proses memberikan dukungan moral dan motivasi kepada individu atau kelompok untuk terus berusaha meskipun menghadapi tantangan.
 5. Pembinaan adalah proses yang berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan individu atau kelompok.
 6. Pendampingan adalah dukungan langsung yang diberikan kepada individu atau kelompok selama proses pemberdayaan.

Pada proses pemberdayaan, terdapat serangkaian tahapan yang perlu diikuti. Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007), ada tiga tahapan utama dalam pemberdayaan. Tahap pertama adalah penyadaran, di mana masyarakat yang menjadi fokus pemberdayaan diberi pemahaman bahwa setiap individu memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Tahap kedua adalah pengkapasitasan, di mana masyarakat diberi kemampuan untuk menerima dan mengelola daya.

Biasanya, tahap ini juga dikenal sebagai pembangunan kapasitas, yang melibatkan peningkatan keterampilan individu, organisasi, dan nilai-nilai sistem. Tahap terakhir adalah pendayaan, di mana masyarakat diberikan kekuatan, kewenangan, atau kesempatan untuk mandiri. Pemberian daya ini disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian masing-masing individu (Endah, 2020).

Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan program pemerintah yang memiliki tujuan untuk memberdayakan keluarga yang berada dalam kondisi kurang mampu melalui penyediaan bantuan sosial berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP). KUBE diwujudkan sebagai sebuah kelompok yang berasal, dari, dan dikelola oleh masyarakat miskin sendiri, dengan tujuan utama meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial mereka. Jumlah anggota KUBE terdiri atas minimal lima dan maksimal dua puluh kepala keluarga, dan jumlah yang diterima bernilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kelompok. Bantuan yang diberikan oleh program ini bersifat non-tunai dan disalurkan melalui transfer ke rekening kelompok. Adapun kriteria penerima bantuan KUBE menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a) Keluarga fakir miskin yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

- b) Kepala keluarga dan/atau pencari nafkah utama dalam keluarga
- c) Telah menikah dan/atau berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan masih produktif;
- d) Berdomisili tetap dan memiliki identitas diri
- e) Memiliki potensi dan keterampilan.

Adapun untuk mengusulkan bansos KUBE melibatkan serangkaian tahapan yang dimulai dengan individu atau masyarakat yang mengajukan proposal kepada Dinas Sosial di tingkat Kabupaten atau Kota melalui Kepala Desa.. Setelah proposal diajukan, Dinas Sosial Kabupaten/Kota akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima KUBE berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Selanjutnya, Dinas Sosial Kabupaten/Kota mengajukan proposal tersebut kepada Menteri Sosial melalui Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I, dengan tembusan yang disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi. Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I kemudian melakukan verifikasi dan validasi terhadap proposal yang diajukan.

Setelah proses tersebut, Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I akan menetapkan lokasi dan penerima bantuan KUBE. Hasil dari penetapan lokasi dan penerima KUBE akan disampaikan kembali kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Terakhir, Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota akan menandatangani Surat Pernyataan

Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk program KUBE.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan sifat atau keunggulan dari pengaruh sosial yang tidak dapat diukur, dijelaskan, atau digambarkan dengan menggunakan metode kuantitatif (Nasution, 2023). Dengan kata lain, penelitian kualitatif fokus pada aspek-aspek yang sulit diungkapkan dengan angka atau statistik, dan lebih menitikberatkan pada pemahaman mendalam tentang berbagai fenomena sosial melalui deskripsi dan interpretasi.

Metode penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat miskin dalam program KUBE di Desa Tawang Sari dijalankan dan bagaimana program tersebut memengaruhi kesejahteraan mereka. Metode ini memungkinkan untuk mengeksplorasi detail dan nuansa pemberdayaan melalui program KUBE yang tidak dapat dicapai dengan pendekatan kuantitatif yang lebih berfokus pada angka. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumentasi.

Kemudian, penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik

purposive sampling, dimana pengambilan sampel dilakukan secara sengaja dengan mengambil sampel tertentu yang memiliki karakteristik, ciri, kriteria, atau sifat tertentu (Sugiyono, 2013). Oleh karena itu, sampel yang diambil tidak dilakukan secara acak. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Sun Falastian Muhammida, S.Pd, M.Si selaku Staf Pendampingan dan Pemberdayaan Dinas Sosial Kab. Blitar yang bertanggung jawab atas implementasi program KUBE di Kab. Blitar. Kemudian informan kedua adalah Abdul Salam, selaku ketua KUBE Batako Tawangarsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program KUBE di Desa Tawangarsi

Proses pemberdayaan masyarakat melalui program KUBE di Desa Tawangarsi terdici atas beberapa tahapan. Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) (dalam Endah, 2020), ada tiga tahapan utama dalam pemberdayaan, yakni sebagai berikut:

1) Tahap penyadaran

Dalam tahap penyadaran, masyarakat yang menjadi fokus pemberdayaan diberi pemahaman bahwa setiap individu memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Penyadaran dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Tawangarsi ini dilakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kab. Blitar. Dalam konteks ini, Dinsos Kab. Blitar

berkolaborasi dengan perangkat Desa Tawangarsi untuk mengumpulkan masyarakat yang kurang mampu di desa tersebut untuk dilakukan pendataan mengenai siapa saja di antara mereka yang memiliki usaha atau pernah memiliki usaha. Proses pendataan ini sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial dapat disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan layak menerima bantuan. Setelah proses pendataan selesai, dilakukan penilaian untuk menentukan kelayakan calon penerima bantuan sosial KUBE. Penilaian ini melibatkan evaluasi terhadap berbagai faktor, termasuk kondisi usaha yang ada, potensi pengembangan, dan kebutuhan spesifik dari setiap calon kelompok usaha. Upaya ini merupakan langkah awal yang penting dalam proses pemberdayaan, karena pemahaman dan kesadaran akan potensi individu merupakan landasan utama untuk mengembangkan kapasitas dan keterampilan yang ada di masyarakat.

Di Desa Tawangarsi sendiri, terdapat salah satu warga yang telah lama menjalankan usaha pembuatan batako di rumahnya sejak tahun 2021. Meskipun telah lama dirintis, usaha batako tersebut mengalami kendala dalam hal keterbatasan modal, sehingga pertumbuhan usahanya terbatas dan tidak berkembang. Dalam konteks ini, Dinsos Kab. Blitar dan perangkat desa melakukan diskusi mendalam dengan pemilik usaha batako tersebut untuk

memahami kendala yang dihadapi serta potensi pengembangan usaha tersebut.

Berdasarkan hasil diskusi dan evaluasi, pihak Dinsos Kab. Blitar mengarahkan pemilik usaha untuk membentuk sebuah kelompok usaha. Pembentukan kelompok usaha ini bertujuan untuk mempermudah akses terhadap bantuan sosial KUBE. Melalui kelompok usaha, diharapkan bantuan yang diberikan dapat dikelola dengan lebih baik, dan pemantauan terhadap perkembangan usaha dapat dilakukan secara lebih efektif. kelompok usaha batakoto tersebut kemudian diberi nama "KUBE Batakoto Tawang Sari" dan melibatkan lima orang anggota yang merupakan warga setempat.

2) Tahap pengkapasitasan

Pada tahap pengkapasitasan, masyarakat diberikan kemampuan untuk menerima dan mengelola daya yang ada. Tahap ini memainkan peranan penting dalam pengembangan komunitas lokal, karena melibatkan peningkatan keterampilan individu, penguatan struktur organisasi, serta penanaman nilai-nilai yang mendukung keberhasilan usaha.

Dalam konteks program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), tahap pengkapasitasan bertujuan untuk mempersiapkan kelompok agar mampu memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan efektif dan usaha tersebut dapat berkembang, sehingga harapannya dengan adanya usaha tersebut mampu mendorong para anggotanya untuk graduasi dari kemiskinan. Pada tahap

pengkapasitasan ini KUBE Batakoto Tawang Sari telah diarahkan untuk membentuk struktur organisasi usaha yang jelas.

Setelah memiliki struktur organisasi yang jelas dan telah memenuhi seluruh syarat untuk menerima bantuan sosial modal usaha bersama, KUBE Batakoto Tawang Sari berhak menerima bantuan usaha sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Bantuan ini dirancang untuk mendukung pengembangan usaha batakoto yang dikelola oleh kelompok tersebut. Pihak Dinas Sosial Kab. Blitar memberikan imbauan yang tegas agar dana bantuan tersebut digunakan dengan sebijak mungkin.

Dalam prakteknya, KUBE Batakoto Tawang Sari mengalokasikan dana bantuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhannya dimana sebanyak enam puluh persen dari total bantuan, yaitu sekitar enam juta rupiah, digunakan untuk membeli alat-alat pembuatan batakoto. Sementara itu, empat puluh persen dari dana bantuan, atau sekitar empat juta rupiah, dialokasikan untuk pengadaan bahan-bahan pembuatan batakoto.

Pada tahap pengkapasitasan biasanya Dinsos Kab. Blitar juga mengadakan program pelatihan usaha. Namun, seringkali program pelatihan tersebut lebih berfokus pada usaha kuliner. Hal ini dikarenakan sektor kuliner memiliki potensi yang cukup tinggi dalam menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja. Pelatihan

usaha tersebut biasanya juga digunakan untuk mendapatkan *skill* yang belum dimiliki para anggota KUBE, misal pelatihan pembuatan jamu yang pernah diadakan oleh Dinsos Kab. Blitar tahun 2022 lalu. Untuk KUBE Batako Tawangsari ini, Dinsos Kab. Blitar tidak mengadakan pelatihan usaha dikarenakan sudah ada salah satu anggota kelompok yang memiliki *skill* untuk membuat batako yang layak jual. Meski begitu pihak Dinsos Kab. Blitar tetap memberikan pengetahuan terkait nilai-nilai yang harus dimiliki ketika membangun usaha dan terkait pengelolaan keuangan.

3) Tahap pendayaan

Di tahap terakhir ini, tahap pendayaan adalah fase kritis di mana masyarakat diberikan kekuatan, kewenangan, atau kesempatan untuk mencapai kemandirian. Tahap ini berfokus pada pemanfaatan potensi individu dan kelompok, serta pemberian dukungan yang diperlukan untuk mengembangkan kapasitas mereka dalam mengelola dan mengembangkan usaha.

Pada tahap pendayaan, yang dilakukan oleh Dinsos Kab. Blitar adalah memastikan bahwa setiap individu dalam kelompok KUBE Batako Tawangsari, memiliki pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab mereka. Dengan memberikan tanggung jawab yang sesuai dengan keterampilan dan keahlian masing-masing anggota,

kelompok dapat berfungsi secara lebih efisien dan produktif.

Selain itu, Dinas Sosial juga memberikan dukungan tambahan melalui penyediaan pendamping lapangan. Pendamping lapangan ini bertujuan untuk membantu kelompok dalam mengatasi kendala yang mungkin mereka hadapi selama proses produksi dan pengelolaan usaha. Pendamping lapangan juga berperan sebagai mentor yang memberikan bimbingan dan solusi untuk berbagai masalah yang muncul, sehingga kelompok dapat terus menjalankan usaha mereka dengan lebih efektif.

Selama tahap pendayaan, Dinsos Kab. Blitar secara berkala juga melakukan evaluasi atau monitoring perkembangan kelompok usaha untuk memastikan bahwa dukungan yang diberikan tetap relevan dan efektif. Monitoring ini juga melibatkan penilaian terhadap kinerja kelompok, pencapaian tujuan, dan kemampuan mereka dalam mengelola usaha. Berdasarkan hasil monitoring, Dinsos Kab. Blitar dapat melakukan penyesuaian terhadap dukungan yang diberikan, seperti menambah pelatihan tambahan atau memperbaiki fasilitas yang diperlukan.

Analisis Teori Pemberdayaan Masyarakat Stewart pada Implementasi Program KUBE di Desa Tawangsari

Setelah melihat penjelasan tahapan pemberdayaan melalui program KUBE di atas, selanjutnya dapat

ditentukan apakah pemberdayaan di Desa Tawang Sari berhasil atau tidak. Berdasarkan teori (Stewart, 1994) keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat melalui enam indikator berikut:

1. Penyadaran

Penyadaran ini merupakan langkah awal dalam proses pemberdayaan masyarakat. Di sini, masyarakat yang menjadi fokus pemberdayaan diberikan pemahaman bahwa setiap individu memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Penyadaran dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Blitar dengan mengumpulkan masyarakat kurang mampu yang memiliki usaha atau pernah membuka usaha untuk kemudian dikenalkan dengan program KUBE.

2. Koordinasi

Koordinasi terjadi antara Dinas Sosial dan perangkat desa dalam mengimplementasikan program KUBE. Kerjasama ini penting untuk memastikan bahwa program dapat berjalan dengan baik dan semua pihak terlibat dalam proses pemberdayaan.

3. Pendidikan

Pendidikan dan pelatihan keterampilan merupakan bagian dari tahap pengkapsitasan. Di sini, anggota kelompok KUBE Batako Tawang Sari dilatih untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola usaha. Pendidikan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis yang diperlukan

untuk menjalankan usaha secara mandiri.

4. Penyemangatan

Penyemangatan dapat terjadi sepanjang proses pemberdayaan, terutama saat anggota kelompok KUBE menghadapi tantangan. Dinas Sosial Kab. Blitar dan pendamping lapangan berperan dalam memberikan motivasi dan dukungan moral kepada anggota kelompok untuk terus berusaha dan tidak menyerah.

5. Pembinaan

Pembinaan juga merupakan bagian dari proses pengkapsitasan, di mana anggota kelompok KUBE dibimbing untuk mengembangkan usaha mereka. Pembinaan ini mencakup pengembangan keterampilan manajerial dan pengelolaan usaha yang lebih baik.

6. Pendampingan

Pendampingan adalah dukungan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kab. Blitar melalui petugas pendamping lapangan. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu kelompok dalam mengatasi kendala yang mungkin mereka hadapi selama proses produksi dan pengelolaan usaha, serta memberikan bimbingan dan solusi untuk masalah yang muncul.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat melalui Program KUBE di Desa Tawang Sari

Program KUBE sendiri pasti memiliki faktor pendukung dan penghambat. Menurut Sun Falastian Muhammida, S.Pd, M.Si keberhasilan pelaksanaan program KUBE di

Kabupaten Blitar antara lain yakni adanya regulasi dari Kementerian Sosial serta adanya sistem pemantauan atau monitoring.

Faktor pendukung keberhasilan pemberdayaan program KUBE yang pertama adalah adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai dasar pelaksanaan KUBE. Program KUBE diatur oleh Peraturan Kemensos yakni Permensos No. 2 Tahun 2019. Dalam Regulasi Kemensos yang mengatur KUBE (Permensos No. 2 Tahun 2019) diatur terkait kriteria penyerapan bantuan, yang mencakup keluarga fakir miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kriteria ini memastikan bahwa bantuan diterima oleh kelompok yang sebenarnya miskin dan memerlukan bantuan. Hal ini mengurangi tingkat kesalahpahaman informasi dan meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat miskin untuk ikut serta dalam program KUBE, sehingga angka kemiskinan yang tinggi dapat menurun. Pada intinya, regulasi dari Kemensos dapat menjadi faktor pendukung pelaksanaan program KUBE karena memastikan pemahaman program, koordinasi yang baik dengan berbagai pihak, kriteria penyerapan bantuan yang tepat, mekanisme pemberian bansos KUBE yang transparan, serta penanganan kemiskinan yang menjadi pusat dalam program KUBE.

Faktor kedua yakni adanya pemantauan atau monitoring. Sistem

pemantauan atau monitoring dapat membantu program KUBE (Kelompok Usaha Bersama) berjalan dengan baik, sebab dengan dilakukannya monitoring memungkinkan untuk mengetahui sejauh mana program berkembang serta mengetahui kendala atau permasalahan yang muncul pada pelaksanaan KUBE, sehingga permasalahan tersebut bisa segera diidentifikasi. Monitoring juga memungkinkan untuk mengukur seberapa efektif program, termasuk seberapa baik masyarakat penerima bantuan memahami program KUBE dan apakah program tersebut tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tujuan. Dengan informasi yang diperoleh dari monitoring, program KUBE dapat disesuaikan di evaluasi kembali agar tujuannya dapat tercapai. Dinas Sosial Kabupaten Blitar sendiri, melakukan monitoring kepada seluruh KUBE di daerahnya sebanyak dua kali dalam setahun. Monitoring dilakukan dalam jangka waktu selama dua tahun.

Kemudian, faktor penghambat pemberdayaan masyarakat melalui KUBE di Desa Tawangsari adalah keterbatasan anggaran yang diterima tiap kelompok, yakni hanya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah untuk setiap kelompok). Dengan dana yang sebegitu kecilnya, akan sulit untuk mencapai tujuan besar program KUBE yakni mendorong masyarakat miskin untuk memiliki usaha sendiri dan mencapai kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan (graduasi dari kemiskinan). Padahal, untuk

mengembangkan usaha dan melakukan pelatihan usaha yang diperlukan anggota KUBE untuk bersaing di pasar dan keluar dari kemiskinan tidak dapat dipenuhi dengan dana yang terbatas.

Hal ini sesuai dengan salah satu pernyataan penerima manfaat program, yang menyebutkan adanya KUBE sudah dapat membantu untuk menambah penghasilan, tetapi kalau untuk dijadikan sebagai pekerjaan utama, KUBE masih belum mampu *mengcover* semua kebutuhan untuk sehari-hari. Apalagi ini usaha ini masih skala rumahan dan untungnya tipis, itu pun harus dibagi rata dengan para anggota kelompok. Intinya, KUBE di Desa Tawang Sari saat ini masih dijadikan sebagai sampingan, bukan sebagai pekerjaan utama. Oleh karena itu, agar program KUBE dapat mencapai tujuannya, harus dipertimbangkan pendekatan alternatif, seperti mencari sumber pendanaan tambahan melalui kemitraan dengan dunia usaha atau mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia.

Kemudian, untuk mengatasi tantangan tersebut, peneliti merekomendasikan melakukan kegiatan evaluasi dan pemantauan secara lebih rutin, misalnya tiap dua bulan atau tiga bulan sekali. Evaluasi yang lebih sering akan membantu mengidentifikasi perubahan yang diperlukan dengan cepat dan memastikan bahwa program KUBE berjalan sesuai dengan rencana, sehingga dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menjelaskan bahwa Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Tawang Sari, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, telah berhasil dalam memberdayakan masyarakat miskin melalui pendekatan yang terstruktur. Melalui tiga tahapan yakni penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan dapat dilihat bahwa program ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimiliki dan memberikan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola usaha. Bahkan, berdasarkan analisis enam indikator pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh (Stewart, 1994) yang terdiri atas penyadaran, koordinasi, mendidik, menyemangati, pembinaan, dan pendampingan menunjukkan bahwa implementasi program KUBE sudah mencakup keenam indikator tersebut, sehingga pemberdayaan masyarakat pada KUBE di Desa Tawang Sari dapat dikatakan berhasil.

Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Tawang Sari juga telah berhasil meningkatkan kesejahteraan anggotanya, yang terlihat dari adanya penambahan penghasilan dari usaha yang dikelola secara kolektif. Melalui program ini, anggota KUBE mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola usaha, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan pendapatan rumah tangga mereka. Namun, meskipun ada

kemajuan dalam hal kesejahteraan, program ini masih menghadapi tantangan besar dalam mendorong anggotanya untuk graduasi dari kemiskinan. Salah satu faktor utama yang menghambat pencapaian tersebut adalah keterbatasan anggaran dalam bantuan usaha yang diberikan, yang hanya sebesar Rp. 10.000.000 per kelompok. Dana yang terbatas ini sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pengembangan usaha yang lebih besar dan berkelanjutan.

Untuk mengatasi hambatan ini, sangat penting untuk menjalin kemitraan dengan dunia usaha. Dengan membangun hubungan yang kuat dengan pelaku bisnis lokal, KUBE Batako Tawangsari dapat memperluas jaringan dan akses pasar untuk produk yang dihasilkan. Sebagai contoh, KUBE

Batako Tawangsari dapat melakukan inisiatif untuk melobi toko bangunan di sekitarnya guna mempromosikan produk batako yang mereka hasilkan. Melalui strategi ini, diharapkan produk batako tersebut dapat dikenal lebih luas, sehingga meningkatkan penjualan dan pendapatan kelompok. Selain itu, kemitraan ini juga dapat membuka peluang untuk mendapatkan dukungan teknis dan pelatihan dari pihak-pihak yang lebih berpengalaman dalam industri, yang akan semakin memperkuat kapasitas anggota KUBE. Dengan tersebut, diharapkan KUBE tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya, tetapi juga dapat membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, J. (2020). Budaya Kemiskinan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia. *Sosio Informa*, 6(2). <https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2372>
- Auliyazahra, A., & Mulyono, S. E. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Produksi Batik Pring Sedapur Di KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Mukti Rahayu Kabupaten Magetan. *Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika*, 2(3), 214–224. <https://doi.org/10.51903/bersatu.v2i3.740>
- BPS. (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. <https://www.bps.go.id/pressreleases/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>
- BPS Prov. Jawa Timur. (2023). *Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Ribu Jiwa), 2019-2023*. <https://jatim.bps.go.id/indicator/23/421/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur.html>
- Duraesa, A. (2021). *Kemiskinan Di Indonesia Antara Kajian Empiris dan Teologis*. PT RajaGrafindo Persada.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135–143.

- <https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/3319/2914>
- Febriani, Marom, A., & Nurcahyanto, H. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kelompok Usaha. *Journal of Public Policy and Management Review*, 4(101), 1–15.
- Habib, M. F. A. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative*, 82(2), 2776–7434. <http://ejournal.iaintulungagung.ac.id/index.php/arrehla/index>
- Heriska, R., Agustian, E., & Mutaqin, Z. (2023). Analisis faktor-faktor penyebab kemiskinan di Desa Suro, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas. *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 18(2), 504. <https://doi.org/10.20961/region.v18i2.67115>
- Humaira, D. R. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, 7(2), 99–108.
- Hurriati, L. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di Kube Waroh Dusun Penangka Desa Sesaot). *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 4(2), 253–264. <https://doi.org/10.29408/jpek.v4i2.2777>
- Kemensos RI. (2019). *Kelompok Usaha Bersama (KUBE)*. <https://kemensos.go.id/kube>
- Musfirah, A. F. K. (2024). Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemanfaatan Zakat dan Infaq: Pendekatan Akuntansi Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9(204), 603–612.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Harfa Creative.
- Sari, Y. A. (2021). Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 10(2), 121–130.
- Sri Handini; Sukeesi; Hartati Kanty Astuti. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pengembangan UMKM Wilayah Pesisir*. Scopindo Media Pustaka.
- Stewart, A. M. (1994). *Empowering People*. Pitman Publishing.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.
- Utami, Ninda Talita; Imaningsih, N. (2024). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Tingkat Kemiskinan sebagai Variabel Intervening Pada Provinsi Jawa Timur. *Journal of Management and Business (JOMB)*, 6, 189–202.
- Wawancara, Sun Falastian Muhammadiyah selaku Staf Pendampingan dan Pemberdayaan Dinas Sosial Kab. Blitar.
- Wawancara, Abdul Salam, selaku ketua KUBE Batako Tawang Sari.